



**RINGKASAN LAPORAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH KOTA PANGKAL PINANG  
TAHUN 2025**

**PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG  
TAHUN 2026**

## 1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum, yang dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro meliputi Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per Kapita dan Ketimpangan Pendapatan. Secara ringkas, capaian kinerja makro Kota Pangkal Pinang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Capaian Kinerja Makro Kota Pangkal Pinang  
Tahun 2024-2025**

| No | Indikator Kinerja                                             | Capaian Kinerja |           | Laju kinerja (%) |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------------|
|    |                                                               | 2024            | 2025      |                  |
| 1  | Indeks Pembangunan Manusia                                    | 80.9            | 81,64     | 0,91             |
| 2  | Angka Kemiskinan                                              | 4,04            | 4,5       | 11,39            |
| 3  | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)                            | 5,98            | 5,73      | -4,18            |
| 4  | Pertumbuhan Ekonomi                                           | -2,3            | 4,54      | -297,39          |
| 5  | PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (ribu rupiah) | 82.197,55       | 87.212,95 | 6,10             |
| 6  | Ketimpangan Pendapatan (Gini ratio)                           | 0,292           | 0,249     | -14,73           |

Sumber : BPS Kota Pangkal Pinang

## 2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Capaian kinerja urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar, termasuk diantaranya :

### 2.1. Urusan Pendidikan

#### 2.1.1. Capaian Kinerja

Capaian kinerja urusan pendidikan Kota Pangkal Pinang pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut.

| No | Indikator Kinerja Kunci                                                            | Capaian Kinerja Tahun 2024 | Capaian kinerja Tahun 2025 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1  | Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini | 70,43 %                    | 68,36 %                    |
| 2  | Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar         | 90,18 %                    | 95,10 %                    |
| 3  | Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan    | 75,48 %                    | 88,40 %                    |

| No | Indikator Kinerja Kunci                                                            | Capaian Kinerja Tahun 2024 | Capaian kinerja Tahun 2025 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 4  | Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik*      | -                          | 59,12 %                    |
| 5  | Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik* | -                          | 53,82 %                    |

Catatan :

\*) Indikator baru tahun 2025

### 2.1.2. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Realisasi belanja urusan pendidikan di Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 sebesar Rp. 204.308.282.286,- dengan program/kegiatan prioritas sebagai berikut:

- Program Pengelolaan Pendidikan Dasar** dengan kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan;
- Program Pengembangan Kurikulum** dengan kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar;
- Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan** dengan kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan;
- Program Pengendalian Perizinan Pendidikan** dengan kegiatan Penerbitan izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat

### 2.1.3. Permasalahan Yang Dihadapi

Pada tahun 2025 tidak terdapat permasalahan yang menyebabkan terhambatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan di Kota Pangkal Pinang.

## 2.2. Urusan Kesehatan

### 2.2.1. Capaian Kinerja

Capaian kinerja urusan kesehatan yang diperoleh oleh Kota Pangkal Pinang pada Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut.

| NO | INDIKATOR KINERJA KUNCI                        | CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 |
|----|------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1  | Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk | 3,0005985                  | -                          |

| NO | INDIKATOR KINERJA KUNCI                                                                                                                                    | CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2  | Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi                                                                                            | 88,89%                     | -                          |
| 3  | Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar                                                                                                    | 99,72%                     | 99,73%                     |
| 4  | Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar                                                                                                 | 99,78%                     | 99,12%                     |
| 5  | Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar                                                                                              | 99,88%                     | 99,28%                     |
| 6  | Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar                                                                                                       | 99,35%                     | 99,91%                     |
| 7  | Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar                                                                                   | 99,89%                     | 100%                       |
| 8  | Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar                                                                                          | 97,02%                     | 100%                       |
| 9  | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                                               | 68,77%                     | 99,89%                     |
| 10 | Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar                                                                                         | 100%                       | 100%                       |
| 11 | Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar                                                                                   | 100%                       | 100%                       |
| 12 | Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar                                                                             | 100%                       | 100%                       |
| 13 | Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar                                                                                   | 100%                       | 100%                       |
| 14 | Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar | 100%                       | 100%                       |
| 15 | Persentase kematian ibu*                                                                                                                                   | -                          | 0,03 %                     |
| 16 | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita*                                                                                                | -                          | 1,51%                      |

Catatan :

\* Indikator baru Tahun 2025

### 2.2.2. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Penyelenggaraan urusan Kesehatan di Kota Pangkal pinang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan beserta UPT yang berada dibawahnya serta RSUD Depati Hamzah. Realisasi belanja urusan kesehatan di Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 sebesar Rp. 254.462.722.518,77 dengan program/kegiatan prioritas sebagai berikut.

- a. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** dengan kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD;
- b. **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat** dengan kegiatan Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi, Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota ;
- c. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan** dengan kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota dan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- d. **Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman** dengan kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga, Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM), Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan;
- e. **Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan** dengan kegiatan Advokasi Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

### 2.2.3. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan kesehatan di Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Permasalahan dalam penentuan masyarakat yang menjadi sasaran target pemenuhan penerapan SPM;
- Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan *screening* kesehatan karena takut dengan hasilnya;

- Kegiatan yang dilaksanakan terkait penerapan SPM (hipertensi) sering bersamaan dengan pelaksanaan event lain, sehingga hasil yang diperoleh kurang maksimal
- Belum optimalnya penganggaran dalam penerapan SPM.

## 2.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

### 2.3.1. Capaian Kinerja

Capaian kinerja urusan kesehatan yang diperoleh oleh Kota Pangkal Pinang pada Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut.

| No | Indikator Kinerja Kunci                                                                                                                                                                                                                        | Capaian Kinerja Tahun 2024                           | Capaian kinerja Tahun 2025                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1  | Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota                                                                                                                                                                                           | -<br>(tidak terdapat irigasi di Kota Pangkal Pinang) | -<br>(tidak terdapat irigasi di Kota Pangkal Pinang) |
| 2  | Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota                                                                                                                                                                                                     | 93,91%                                               | 93,54%                                               |
| 3  | Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota | 41,80%                                               | 98,13%                                               |
| 4  | Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik                                                                                                                                                                 | 98,21%                                               | 99,73%                                               |
| 5  | Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir                                                                                                                           | -                                                    | 46,44%                                               |
| 6  | Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota                                                                                                                                              | -                                                    | 0,39%                                                |
| 7  | Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                | 100%                                                 | 100%                                                 |
| 8  | Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah *                                                                                                                                                                | -                                                    | 0                                                    |
| 9  | Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi                                                                                                                                                               | 49,33%                                               | 6,15%                                                |
| 10 | Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota                                                                              | -                                                    | 0                                                    |

Catatan :

\* Indikator baru Tahun 2025

### 2.3.2. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Realisasi belanja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 sebesar Rp. 37.640.251.838,- dengan program/kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. **Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)** dengan kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- b. **Program Pengelolaan Pengembangan Sistem Air Minum** dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM di Daerah Kab/Kota;
- c. **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah** dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- d. **Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional** dengan kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota;
- e. **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase** dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- f. **Program Penataan Bangunan Gedung** dengan kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
- g. **Program Penyelenggaraan Jalan** dengan kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/kota;
- h. **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang** dengan kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota, Koordinasi Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota dan Koordinasi Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

### 2.3.3. Permasalahan Yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kota Pangkal Pinang pada tahun 2025 adalah ketersediaan anggaran penerapan SPM masih belum maksimal, sehingga belum seluruh kegiatan pendukung SPM bidang urusan pekerjaan umum dapat terakomodir dengan maksimal. Solusi untuk masalah ini adalah memaksimalkan perencanaan dan penganggaran dalam APBD Tahun 2026.

## 2.4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

### 2.4.1. Capaian Kinerja

Capaian kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman yang diperoleh oleh Kota Pangkal Pinang pada Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut.

| No | Indikator Kinerja Kunci                                                                | Capaian Kinerja Tahun 2024 | Capaian kinerja Tahun 2025 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1  | Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni | 0                          | 0                          |
| 2  | Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani                 | 0                          | 0                          |
| 3  | Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani                                      | 2,57%                      | 2,03%                      |
| 4  | Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)       | 100%                       | -                          |
| 5  | Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum *)     | -                          | 2,38%                      |

Catatan :

\*) Indikator baru tahun 2025

### 2.4.2. Realisasi Belanja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Realisasi belanja urusan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 sebesar Rp. 7.223.545.852,00,- dengan program/kegiatan prioritas sebagai berikut.

- Program Pengembangan Perumahan** dengan kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;
- Program Kawasan Permukiman** dengan kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman serta Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) ha;
- Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh** dengan kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota; dan
- Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)** dengan Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan.

### 2.4.3. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Terdapat pengembang yang masih belum menyerahkan asetnya ke Pemerintah Kota Pangkal Pinang, sehingga pihak Pemerintah Kota Pangkal Pinang tidak dapat melaksanakan perawatan PSU nya;
- Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Bidang Perumahan Rakyat maka pemenuhan layanan SPM bidang Perumahan Rakyat harus terdapat surat penetapan kepala daerah untuk kejadian bencana dan relokasi karena program pemerintah, dan tahun 2025 tidak terdapat penetapan kepala daerah terkait kejadian bencana dan relokasi program pemerintah.

## 2.5. Urusan Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat

### 2.5.1. Capaian Kinerja

Capaian kinerja urusan ketenteraman umum dan perlindungan masyarakat yang diperoleh oleh Kota Pangkal Pinang pada Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut.

| No | Indikator Kinerja Kunci                                                                            | Capaian Kinerja Tahun 2024 | Capaian Kinerja Tahun 2025 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1  | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan                                              | 100%                       | 100%                       |
| 2  | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan                                                       | 100%                       | 100%                       |
| 3  | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana                                | 100%                       | -                          |
| 4  | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana      | 0,216%                     | 0,02%                      |
| 5  | Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100%                       | 100%                       |
| 6  | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran                                    | 100%                       | 100%                       |
| 7  | Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran                                                 | 13 menit                   | -                          |

| No | Indikator Kinerja Kunci                                                   | Capaian Kinerja Tahun 2024 | Capaian Kinerja Tahun 2025 |
|----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 8  | Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku *) | -                          | 100%                       |

Catatan :

\*) Indikator baru tahun 2025

### 2.5.2. Realisasi Belanja Urusan Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat

Realisasi belanja urusan ketenteraman umum dan perlindungan masyarakat di Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 sebesar Rp. 26.219.017.932,- yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

- a. **Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** dengan kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota serta Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
- b. **Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran** dengan kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran, Investigasi Kejadian Kebakaran, Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran;
- c. **Program Penganggulangan Bencana** dengan kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana serta Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

### 2.5.3. Permasalahan Yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi untuk urusan ketenteraman umum dan perlindungan masyarakat di Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- keterlambatan penyusunan dokumen Rencana Kontijensi menyebabkan mundurnya waktu pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan KIE di daerah rawan bencana;
- tidak terlaksananya kegiatan pengembangan kapasitas TRC karena selama tahun 2025 terdapat kejadian bencana yang menyebabkan pelatihan belum dapat dilaksanakan;
- keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pendukung penerapan SPM

## 2.6. Urusan Sosial

### 2.6.1. Capaian Kinerja

Capaian kinerja urusan sosial yang diperoleh oleh Kota Pangkal Pinang pada Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut.

| No | Indikator Kinerja Kunci                                                                                                                                                         | Capaian Kinerja Tahun 2024 | Capaian kinerja Tahun 2025 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1  | Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) | 100%                       | -                          |
| 2  | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota                                 | 100%                       | 100%                       |
| 3  | Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti                                                                                     | -                          | 100%                       |
| 4  | Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti                                                                                                       | -                          | 100%                       |
| 5  | Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti                                                                                                | -                          | 100%                       |
| 6  | Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti                                                                                             | -                          | 100%                       |
| 7  | Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar                                                                                                                      | -                          | 100%                       |

### 2.6.2. Realisasi Belanja Urusan Sosial

Realisasi belanja urusan sosial di Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 sebesar Rp. 7.039.606.117,- dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

- Program Pemberdayaan Sosial** dengan kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota;
- Program Rehabilitasi Sosial** dengan kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti, Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti;
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial** dengan kegiatan Pengelolaan Data Fakir miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
- Program Penanganan Bencana** dengan kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota.

### 2.6.3. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan sosial di Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Belum optimalnya pagu anggaran serta sarana dan prasarana pendukung penerapan SPM
- Uraian penganggaran sub kegiatan SPM belum dipisahkan sesuai dengan jenis layanan, sehingga menyebabkan kesulitan dalam pemilahan target layanan.
- Peningkatan kapasitas aparatur penanganan bencana pada tahun 2025 karena keterbatasan anggaran
- Pengumpulan data korban bencana masih bergantung pada pengurus RT dan RW yang belum mendapatkan pelatihan kebencanaan

## 3. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

### 3.1. Hasil EPPD Tahun 2023 dan 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-2109 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2024 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023, Pemerintah Kota Pangkal Pinang berhasil memperoleh hasil EPPD dengan skor kinerja **3,2012** dan status kinerja **Sedang**.

Sedangkan untuk hasil evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tahun 2025 sampai saat ini masih belum ada.

### 3.2. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022

Berdasarkan Laporan Nomor : 97.B/LHP/XVIII.PPG/05/2025, Pemerintah Kota Pangkal Pinang berhasil mendapatkan Opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pangkal Pinang tahun 2024 yang berarti bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pangkal Pinang menyajikan secara wajar dalam semua hal, dalam material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas Pemerintah Kota Pangkal Pinang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Predikat WTP di tahun 2024 merupakan perolehan ke delapan bagi Pemerintah Kota Pangkal Pinang.

Sedangkan opini terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 belum dirilis sampai dengan saat ini karena masih dalam proses pemeriksaan.

#### 4. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang (*unaudited*) Tahun 2025, realisasi pendapatan Pemerintah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 mencapai sebesar Rp. 930.148.552.085,21 dan realisasi belanja Pemerintah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 mencapai Rp. 920.076.387.893,41.

Secara rinci, realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut.

##### 4.1. Pendapatan Daerah

| Kode Rekening    | Uraian                                                                    | Anggaran                  | Realisasi *               | %             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| <b>4</b>         | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                                                  | <b>993.294.792.032,00</b> | <b>930.148.552.085,21</b> | <b>93,64</b>  |
| <b>4.1.</b>      | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                       | <b>239.425.583.521,00</b> | <b>258.322.452.782,21</b> | <b>107,89</b> |
| <b>4.1.01.</b>   | Pajak Daerah                                                              | 152.179.909.235,00        | 160.870.854.972,00        | 105,71        |
| <b>4.1.02.</b>   | Retribusi Daerah                                                          | 67.723.374.160,00         | 74.192.369.505,80         | 109,55        |
| <b>4.1.03.</b>   | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan                         | 6.707.028.141,00          | 6.645.398.017,98          | 99,08         |
| <b>4.1.04.</b>   | Lain-lain PAD Yang Sah                                                    | 12.815.271.985,00         | 16.613.830.286,43         | 129,64        |
|                  | <b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                                      | <b>239.425.583.521,00</b> | <b>258.322.452.782,21</b> | <b>107,89</b> |
| <b>4.2.</b>      | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                                | <b>743.457.998.511,00</b> | <b>664.177.345.607,00</b> | <b>89,33</b>  |
| <b>4.2.01.01</b> | Dana Perimbangan                                                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00          |
| <b>4.2.01.07</b> | Dana Bagi Hasil (DBH)                                                     | 42.885.903.000,00         | 40.376.807.100,00         | 94,14         |
| <b>4.2.01.08</b> | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                   | 470.005.742.000,00        | 419.617.880.870,00        | 89,27         |
| <b>4.2.01.09</b> | Dana Alokasi Khusus (DAK)                                                 | 161.556.529.000,00        | 134.875.490.748,00        | 83,48         |
|                  | <b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN</b>                        | <b>674.448.174.000,00</b> | <b>594.870.178.718,00</b> | <b>88,20</b>  |
| <b>4.2.01.06</b> | Insentif Fiskal                                                           | 6.985.539.000,00          | 6.985.539.000,00          | 100           |
|                  | <b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>              | <b>6.985.539.000,00</b>   | <b>6.985.539.000,00</b>   | <b>100</b>    |
| <b>4.2.02.</b>   | Pendapatan Transfer Antar Daerah                                          | 62.024.285.511,00         | 62.321.627.889,00         | 100,47        |
| <b>4.2.02.01</b> | Pendapatan Bagi Hasil                                                     | 58.098.049.511,00         | 58.586.395.889,00         | 100,84        |
| <b>4.2.02.02</b> | Bantuan Keuangan                                                          | 3.926.236.000,00          | 3.735.232.000,00          | 95,13         |
|                  | <b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH</b>                            | <b>62.024.285.511,00</b>  | <b>62.321.627.889,00</b>  | <b>100,47</b> |
|                  | <b>TOTAL PENDAPATAN TRANSFER</b>                                          | <b>743.457.998.511,00</b> | <b>664.177.345.607,00</b> | <b>89,33</b>  |
| <b>4.3.</b>      | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                               | <b>10.411.210.000,00</b>  | <b>7.648.753.696,00</b>   | <b>73,46</b>  |
| <b>4.3.03.</b>   | Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | 10.411.210.000,00         | 7.648.753.696,00          | 73,46         |
|                  | <b>JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                        | <b>10.411.210.000,00</b>  | <b>7.648.753.696,00</b>   | <b>73,46</b>  |
|                  | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                                                  | <b>993.294.792.032,00</b> | <b>930.148.552.085,21</b> | <b>93,64</b>  |

Sumber : Bakeuda Pangkal Pinang, *unaudited*

## 4.2. Belanja Daerah

| Kode Rekening     | Uraian                                                     | Anggaran                    | Realisasi *               | %            |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|
| <b>5</b>          | <b>BELANJA DAERAH</b>                                      | <b>1.050.068.184.753,90</b> | <b>920.076.387.893,41</b> | <b>87,62</b> |
| <b>5.1.</b>       | <b>BELANJA OPERASI</b>                                     | <b>948.681.479.698,82</b>   | <b>821.753.126.775,77</b> | <b>86,62</b> |
| <b>5.1.01.</b>    | Belanja Pegawai                                            | 546.091.807.729,82          | 450.110.966.423,27        | 82,42        |
| <b>5.1.02.</b>    | Belanja Barang dan Jasa                                    | 358.261.212.369,00          | 331.522.831.749,50        | 92,53        |
| <b>5.1.05.</b>    | Belanja Hibah                                              | 42.996.619.600,00           | 38.798.602.047,00         | 90,23        |
| <b>5.1.06.</b>    | Belanja Bantuan Sosial                                     | 1.331.840.000,00            | 1.320.726.556,00          | 99,16        |
|                   | <b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>                              | <b>948.681.479.698,82</b>   | <b>821.753.126.775,77</b> | <b>86,62</b> |
| <b>5.2.</b>       | <b>BELANJA MODAL</b>                                       | <b>99.679.618.631,00</b>    | <b>97.971.510.672,64</b>  | <b>98,28</b> |
| <b>5.2.01.</b>    | Belanja Modal Tanah                                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00         |
| <b>5.2.02.</b>    | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                          | 32.301.034.902,00           | 31.313.469.413,00         | 96,94        |
| <b>5.2.03.</b>    | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                          | 34.972.341.411,00           | 34.800.401.097,00         | 99,50        |
| <b>5.2.04.</b>    | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi                  | 20.744.991.000,00           | 20.620.043.000,00         | 99,39        |
| <b>5.2.05.</b>    | Belanja Modal Aset Tetap lainnya                           | 11.550.028.318,00           | 11.126.458.963,64         | 96,33        |
| <b>5.2.06.</b>    | Belanja Modal Aset Lainnya                                 | 111.223.000,00              | 111.138.199,00            | 99,92        |
|                   | <b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>                                | <b>99.679.618.631,00</b>    | <b>97.971.510.672,64</b>  | <b>98,28</b> |
| <b>5.3.</b>       | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>                               | <b>1.407.086.424,08</b>     | <b>51.750.445,00</b>      | <b>3,67</b>  |
| <b>5.3.01</b>     | Belanja Tidak Terduga                                      | 1.407.086.424,08            | 51.750.445,00             | 3,67         |
|                   | <b>JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA</b>                        | <b>1.407.086.424,08</b>     | <b>51.750.445,00</b>      | <b>3,67</b>  |
| <b>5.4.</b>       | <b>BELANJA TRANSFER</b>                                    | <b>300.000.000,00</b>       | <b>300.000.000,00</b>     | <b>100</b>   |
| <b>5.4.02.04.</b> | Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi | 300.000.000,00              | 300.000.000,00            | 100          |
|                   | <b>JUMLAH BELANJA TRANSFER</b>                             | <b>300.000.000,00</b>       | <b>300.000.000,00</b>     | <b>100</b>   |
|                   | <b>JUMLAH BELANJA</b>                                      | <b>1.050.068.184.753,90</b> | <b>920.076.387.893,41</b> | <b>87,62</b> |

Sumber : Bakeuda Pangkal Pinang, *unaudited*

## 5. INOVASI DAERAH

Berdasarkan Database Inovasi Daerah Kota Pangkal Pinang memiliki inovasi daerah sebagai berikut.

| No | Pelaksana Inovasi Daerah | Inovasi Daerah                                                                                                      | Keterangan                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Dinas Dukcapil           | PELANGI DIMATAMU (Pelayanan Keliling Bagi Masyarakat Yang Mengalami Hambatan Dalam Memperoleh Dokumen Kependudukan) | Program ini dirancang khusus untuk mempermudah akses dokumen kependudukan bagi penduduk yang mengalami hambatan, seperti lansia, penyandang disabilitas, orang sakit, atau mereka yang tinggal di area sulit jangkauan. |
| 2  | Dinas Dukcapil           | PERMATA AKIKA (Pelayanan Prima Terima Akta Lahir, kartu keluarga dan Kartu Identitas Anak/KIA)                      | Pelayanan terpadu bagi masyarakat yang baru melahirkan dimana melalui program ini, masyarakat tidak perlu lagi datang ke Kantor Dukcapil untuk                                                                          |

| No | Pelaksana Inovasi Daerah               | Inovasi Daerah                                         | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                        |                                                        | mengurus dokumen kependudukan anaknya. Seluruh proses administrasi dapat dilakukan langsung di RS setelah proses persalinan                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan        | MKDS (Membangun Kebudayaan Dari Sekolah)               | Inovasi ini bertujuan untuk mengembangkan kebudayaan melalui sekolah dengan menggandeng program P5 yang diterapkan di sekolah                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4  | Dinas Sosial                           | SIAP BOS (Sistem Informasi Pendataan Bantuan Sosial)   | Aplikasi ini dikembangkan sebagai salah satu bentuk upaya untuk mendata para masyarakat Kota Pangkalpinang yang membutuhkan. Melalui aplikasi ini, para warga yang masuk kategori fakir miskin atau warga tidak mampu di kota Pangkalpinang dapat mendaftarkan diri/kerabat/orang disekitarnya yang memang benar-benar membutuhkan, dengan tetap dilaksanakan proses pengecekan kelayakan sesuai ketentuan yang berlaku |
| 5  | Dinas Komunikasi dan Informatika       | SIP KADIN (Sistem Informasi Pemantauan Keuangan Dinas) | Inovasi ini dirancang untuk memudahkan pemantauan dan pengawasan realisasi anggaran keuangan dinas/OPD secara real time dan dimaksudkan untuk mendukung tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel serta mendukung proses digitalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang                                                                                                    |
| 6  | Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan   | Si-PGK (Sistem Informasi Perdagangan)                  | Inovasi merupakan terobosan dari Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan guna mengintegrasikan data pengendalian perdagangan, mempermudah pengawasan, dan mempromosikan produk lokal                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7  | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | SIRELASI RTLH                                          | Inovasi pelayanan publik di bidang perumahan guna mempermudah pelayanan rekap usulan survey RTLH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8  | BPBD                                   | BPBD GOES TO SCHOOL                                    | Kegiatan ini merupakan inovasi dari BPBD Kota pangkal Pinang dalam upaya untuk melaksanakan edukasi bagi masyarakat mengenai kebencanaan, terutama bagi masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana                                                                                                                                                                                                                 |
| 9  | Kecamatan Pangkal Balam                | PALING (Pangkal Balam Lawan Stunting)                  | Inovasi ini dimaksudkan untuk mendukung program penurunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| No | Pelaksana Inovasi Daerah | Inovasi Daerah                                               | Keterangan                                                                                                                                                |
|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                          |                                                              | dan pencegahan staunting bagi masyarakat yang ada di lingkup Kecamatan pangkal Balam Kota Pangkal Pinang                                                  |
| 10 | Kelurahan Opas Indah     | MIKIR AKHIRAT (Melayani Kiriman Akta Kelahiran dan Kematian) | Inovasi ini merupakan layanan bagi masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan melalui handphone di wilayah kelurahan Opas Indah Kota Pangkal Pinang |
| 11 | Puskesmas Girimaya       | ASAH (Ayo Sehatkan Anak Sekolah)                             | Inovasi ini merupakan strategi inovatif untuk mengoptimalkan pelayanan UKS dengan melibatkan lintas sektor dan lintas program.                            |

Demikianlah Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 ini disampaikan agar dapat diketahui secara luas oleh masyarakat. Kami membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk dapat menyampaikan saran, kritik serta masukan yang membangun demi kemajuan Kota Pangkal Pinang yang kita cintai. Kritik, saran serta masukan tersebut dapat disampaikan melalui alamat email [pemerintahan@pangkalpinangkota.go.id](mailto:pemerintahan@pangkalpinangkota.go.id).

Kami juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya serta terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh *stake holder* dan masyarakat Kota Pangkalpinang yang telah memberikan dukungan dalam menjaga situasi dan kondisi yang kondusif sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Pangkal Pinang selama tahun 2025 dapat berjalan lancar.

